



# MEMAHAMI EKSISTENSI BURUH

(Perspektif Standpoint)

Oleh:

Turnomo Rahardjo

Adi Nugroho

Dibiayai oleh Dana DIPA FISIP Undip

Tahun Anggaran 2009

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

2009

UPT PERPUSTAKAAN UNDIP

No. Daft. : 664 / FI / FISIP .....

Tgl. : 2 Juli 2014 .....

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian: Memahami Eksistensi Buruh (Perspektif *Standpoint*)
2. Ketua Peneliti:
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Turnomo Rahardjo
  - b. Golongan Pangkat dan NIP : Penata (IIIc)/19601030 198703 1 001
  - c. Fakultas/Jurusan : ISIP/Illmu Komunikasi
3. Alamat Ketua Peneliti:
  - a. Alamat Kantor : Jalan Imam Bardjo, SH No. 1 Semarang
  - b. Alamat Rumah : Jalan Ratu Ratih IV No. 33 Perumnas Tlogosari Semarang
4. Nama Anggota Peneliti : Dr. Adi Nugroho
5. Lokasi Penelitian : Semarang
6. Lama Penelitian : 6 bulan
7. Biaya yang Diperlukan : Rp. 6.470.588,-
8. Sumber Biaya : Dana DIPA FISIP Undip Tahun Anggaran 2009

Semarang, 10 Nopember 2009

Ketua Peneliti

Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. Turnomo Rahardjo

Drs. Agus Hermani DS, MM

NIP. 19601030 198703 1 001

NIP. 19570807 198511 1 001



## ABSTRAK

Dalam setiap peristiwa politik seperti pemilihan umum, buruh dan kelompok-kelompok marjinal lainnya seperti petani dan nelayan selalu menjadi sasaran kelompok lain guna mendapatkan keuntungan-keuntungan politik. Partai politik, kandidat wakil rakyat, calon presiden/wakil presiden, gubernur, bupati/walikota menjadikan buruh sebagai komoditas politik. Melalui pesan-pesan politik yang disampaikan, mereka berusaha untuk menciptakan “realitas” yang tampak melalui penyampaian pesan-pesan politik yang direkayasa secara sistematis.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman politisi dan buruh yang berbeda posisi kelasnya dalam memahami keberadaan buruh. Penelitian ini merupakan kajian dalam komunikasi antarbudaya dengan memberi penekanan pada gagasan teoritik *Standpoint* yang menjelaskan bahwa individu-individu adalah konsumen aktif dari realitas mereka sendiri sekaligus sebagai sumber informasi yang paling penting mengenai pengalaman mereka. Pemikiran teoritik ini juga menjelaskan bahwa posisi kelas (*material life*) akan membentuk dan membatasi pemahaman mengenai relasi sosial.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan kajian fenomenologi, sebuah metoda yang digunakan peneliti untuk memahami obyek-obyek dan peristiwa-peristiwa dari sudut pandang seseorang sebagai *perceiver*. *Phenomenon* adalah penampakan sebuah obyek, peristiwa atau kondisi dalam persepsi individu. Informan yang dilibatkan dalam studi ini adalah politisi (anggota legislatif) DPRD Kota Semarang, aktivis buruh, dan buruh.

Penelitian ini menemukan bahwa bahwa buruh adalah komoditas politik. Perbedaan posisi kelas telah menciptakan perbedaan cara pandang dalam memahami keberadaan buruh. Politisi melakukan rekayasa simbolik melalui pesan-pesan politik yang disampaikan. Pada sisi lain, buruh memperjuangkan nasib mereka sendiri tanpa harus mengikuti praktik komunikasi politik yang dilakukan politisi.

Hal lain yang ditemukan dalam studi ini adalah bahwa relasi komunikasi antara politisi dengan buruh berlangsung dalam suasana yang monolog. Buruh sekadar dipakai sebagai “alat” politisi untuk mendapatkan kekuasaan. Pesan-pesan politik yang disampaikan politisi lebih dipahami sebagai propaganda politik yang bersifat searah daripada komunikasi pemasaran politik yang menekankan pada pentingnya dialog dan negosiasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi.

Implikasi dari studi yang dilakukan adalah perlunya pendidikan politik tidak saja bagi (calon) politisi, tetapi juga kelompok-kelompok marjinal seperti buruh, petani, dan nelayan yang selama ini sekadar dipakai sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan. Melalui pendidikan politik, politisi disadarkan akan pentingnya komunikasi yang etis (dialog). Melalui pendidikan politik, buruh dan kelompok-kelompok marjinal lainnya disadarkan tentang pentingnya keberadaan mereka untuk melakukan negosiasi politik ketika berhadapan dengan politisi yang memanfaatkan keberadaan kelompok-kelompok marjinal.

Dialog menjadi kata kunci dalam relasi komunikasi antara politisi dengan buruh. Melalui dialog akan tercipta kesetaraan diantara kedua belah pihak sekaligus sebagai wujud dari hadirnya “banyak suara” (*many voices*).